

Analisis Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu Dalam Rehabilitasi Anak Jalanan Di Kota Bengkulu

An Analysis Of The Role Of The Social Affairs Office Of Bengkulu City In The Rehabilitation Of Street Children In Bengkulu City

Tito Romadon Saputra ¹⁾; Harius Eko Saputra ²⁾; Yanuar Rikardo ³⁾
^{1,2,3)} Program Studi Adminitrasi Publik Universitas Dehasen Bengkulu
Email ; titoramodhan@qma.com

How to Cite :

Saputra, T. R., Haputra, H. E., Rikardo, Y. (2026). An Analysis Of The Role Of The Social Affairs Office Of Bengkulu City In The Rehabilitation Of Street Children In Bengkulu City. Journal of Multidisciplinary Research. 2(3).

ARTICLE HISTORY

Received [15 Januari 2026]

Revised [04 Maret 2026]

Accepted [30 Maret 2026]

KEYWORDS

Analisis Peran, Dinas Sosial, Rehabilitasi Sosial, Anak Jalanan.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam rehabilitasi anak jalanan di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian berjumlah enam orang yang terdiri dari informan pokok dan informan kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori peran menurut Edy Suhardono (2018) dengan lima indikator, yaitu aksi, patokan, penilaian, paparan, dan sanksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam rehabilitasi anak jalanan telah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya program rehabilitasi yang mencakup sosialisasi, penjangkauan, rumah singgah, pembinaan, serta kerja sama dengan instansi terkait. Patokan yang digunakan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017. Penilaian program dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat, observasi lapangan, dan evaluasi langsung. Paparan menunjukkan bahwa anak jalanan umumnya berasal dari latar belakang keluarga bermasalah, kemiskinan, dan putus sekolah. Sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak dilakukan melalui pendekatan preventif, rehabilitatif, dan represif. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kualitas layanan dan pendekatan yang lebih partisipatif agar rehabilitasi anak jalanan dapat berjalan lebih optimal.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Social Affairs Office of Bengkulu City in the rehabilitation of street children in Bengkulu City. The research employed a descriptive qualitative approach. The informants consisted of six individuals, including key informants and main informants. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The analysis was based on Edy Suhardono's role theory (2018), which includes five indicators: action, prescription, evaluation, description, and sanctions. The findings indicate that the role of the Social Affairs Office of Bengkulu City in rehabilitating street children has been adequately implemented. This is reflected in rehabilitation programs such as socialization, outreach activities, shelter services, guidance, and collaboration with relevant institutions. The guidelines applied are based on Bengkulu City Regional Regulation Number 7 of 2017. Program evaluation is conducted through community satisfaction surveys, field observations, and direct assessments. The description shows that most street children come from problematic family backgrounds, poverty, and school dropouts. Sanctions against child exploitation are implemented through preventive, rehabilitative, and repressive measures. Nevertheless, improvements in service quality and more participatory approaches are still needed to enhance the effectiveness of street children rehabilitation programs.

PENDAHULUAN

Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Keberadaan anak jalanan tidak hanya mencerminkan persoalan ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya masalah struktural seperti kemiskinan, disfungsi keluarga, rendahnya akses pendidikan, serta lemahnya sistem perlindungan sosial. Anak jalanan berada dalam kondisi yang sangat rentan terhadap berbagai risiko sosial, termasuk eksploitasi ekonomi, kekerasan, penyalahgunaan zat, dan marginalisasi sosial. Oleh karena itu, penanganan anak jalanan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan sosial (Sugiyono, 2020). Dalam konteks perlindungan anak, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga masyarakat dan pemerintah. Pemerintah daerah, melalui perangkat daerah yang berwenang, memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program-program konkret di tingkat lokal. Dinas Sosial sebagai instansi yang membidangi urusan kesejahteraan sosial memiliki mandat utama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan, termasuk upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan fungsi sosial anak.

Kota Bengkulu merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi permasalahan anak jalanan. Anak-anak yang hidup dan beraktivitas di jalanan umumnya berusia antara 5 hingga 18 tahun dan menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang publik, baik untuk mencari nafkah maupun sekadar bertahan hidup. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari faktor latar belakang keluarga yang bermasalah, seperti kemiskinan, perceraian orang tua, pengabaian emosional, serta putus sekolah. Kondisi tersebut mendorong anak untuk mencari alternatif penghidupan di jalanan, meskipun penuh dengan risiko sosial dan psikologis. Dalam upaya menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan berbagai kebijakan daerah yang menjadi dasar operasional penanganan anak jalanan. Salah satu kebijakan utama adalah Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial, pembinaan, pengawasan, serta pelibatan masyarakat. Melalui kebijakan ini, diharapkan penanganan anak jalanan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menekankan pendekatan rehabilitatif dan preventif yang berorientasi pada pemulihan fungsi sosial anak.

Meskipun berbagai program rehabilitasi telah dijalankan, seperti sosialisasi kepada masyarakat, penjangkauan anak jalanan, pembinaan di rumah singgah, pelatihan keterampilan, serta pemulangan anak ke keluarga atau fasilitasi pendidikan, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang sering muncul meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi lintas lembaga, serta pendekatan program yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak berdasarkan usia dan latar belakang sosial mereka. Akibatnya, sebagian anak jalanan masih kembali ke jalan meskipun telah mengikuti program rehabilitasi. Untuk memahami sejauh mana efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut, diperlukan analisis terhadap peran Dinas Sosial sebagai aktor utama dalam rehabilitasi anak jalanan. Analisis peran menjadi penting karena peran tidak hanya berkaitan dengan tugas formal yang tertulis dalam regulasi, tetapi juga mencakup perilaku nyata, pola interaksi, serta respons institusi terhadap masalah sosial yang dihadapi. Menurut teori peran, peran merupakan seperangkat perilaku, tanggung jawab, dan harapan yang melekat pada suatu posisi sosial tertentu, baik pada individu maupun institusi (Suhardono, 2018).

Edy Suhardono (2018) mengemukakan bahwa peran dapat dianalisis melalui lima indikator utama, yaitu aksi (action), patokan (prescription), penilaian (evaluation), paparan (description), dan sanksi. Aksi merujuk pada tindakan nyata atau unjuk peran yang dilakukan oleh aktor sosial dalam menjalankan fungsinya. Patokan berkaitan dengan norma, aturan, dan regulasi yang menjadi dasar perilaku. Penilaian mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan peran, baik melalui penghargaan maupun sanksi. Paparan menggambarkan penyajian informasi secara objektif mengenai fenomena yang terjadi. Sanksi berhubungan dengan upaya pengendalian sosial untuk mendorong kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Kerangka ini relevan untuk digunakan dalam menganalisis peran Dinas Sosial karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek normatif dan empiris dari pelaksanaan rehabilitasi anak jalanan. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam penanganan masalah sosial sering kali belum berjalan optimal akibat keterbatasan implementasi kebijakan dan lemahnya pengawasan. Namun, sebagian penelitian juga menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial sangat ditentukan oleh konsistensi program, keterlibatan masyarakat, serta pendekatan yang berpusat pada kebutuhan penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana peran

LANDASAN TEORI

Teori Peran (Role Theory)

Konsep peran merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu sosial yang digunakan untuk memahami perilaku individu maupun institusi dalam suatu sistem sosial. Peran pada dasarnya berkaitan dengan seperangkat perilaku, kewajiban, dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang atau suatu lembaga berdasarkan posisi atau kedudukannya dalam masyarakat. Dengan kata lain, peran menjadi pedoman tentang bagaimana seorang aktor sosial seharusnya bertindak dalam konteks tertentu (Suhardono, 2018).

Dalam perspektif sosiologis, peran tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan norma, nilai, dan struktur sosial. Individu atau institusi yang menduduki suatu posisi sosial akan menghadapi tuntutan dan harapan tertentu dari lingkungan sosialnya. Apabila tuntutan tersebut dijalankan sesuai dengan norma yang berlaku, maka peran dianggap berjalan secara efektif. Sebaliknya, kegagalan dalam menjalankan peran dapat menimbulkan konflik peran atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan (Hogg, 2000).

Edy Suhardono (2018) menjelaskan bahwa peran dapat dipahami sebagai “unjuk peran” (role performance), yaitu penampilan nyata dari perilaku yang diharapkan berdasarkan kedudukan sosial. Dalam konteks organisasi publik, peran tidak hanya diwujudkan melalui tindakan individual pegawai, tetapi juga melalui kebijakan, program, serta pola pelayanan yang dijalankan oleh institusi tersebut. Oleh karena itu, analisis peran institusi pemerintah, seperti Dinas Sosial, perlu melihat aspek normatif (aturan dan kebijakan) serta aspek empiris (praktik di lapangan).

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan dan pengembangan kemampuan individu agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat. Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, rehabilitasi sosial bertujuan untuk membantu individu mencapai kemandirian dan kesejahteraan sosial (Widati, 2015). Dalam konteks anak jalanan, rehabilitasi sosial diarahkan untuk mengembalikan hak-hak anak yang hilang, seperti hak atas pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang. Rehabilitasi juga bertujuan untuk mencegah anak kembali ke jalan dengan menyediakan alternatif kehidupan yang lebih layak melalui pembinaan, pendidikan, dan pemberdayaan keluarga.

Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, mencari nafkah, atau bertahan hidup, baik dengan atau tanpa hubungan yang memadai dengan keluarga. Anak jalanan umumnya berada dalam kondisi rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak anak lainnya (Bambang, 1993).

Keberadaan anak jalanan tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan lemahnya sistem perlindungan anak. Oleh karena itu, penanganan anak jalanan memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penertiban, tetapi juga melalui rehabilitasi sosial yang berorientasi pada pemulihan dan pemberdayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam rehabilitasi anak jalanan di Kota Bengkulu berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang melakukan penggalan data secara langsung melalui interaksi dengan informan dan pengamatan situasi penelitian, sehingga mampu menghasilkan deskripsi yang utuh dan kontekstual (Sugiyono, 2016; Moleong, 2019). Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada pemaparan fakta dan proses pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial sesuai indikator peran yang digunakan dalam penelitian.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam urusan kesejahteraan sosial, khususnya rehabilitasi sosial anak jalanan. Informan penelitian berjumlah enam orang yang terdiri dari informan pokok dan informan kunci. Informan pokok dipilih dari unsur internal Dinas Sosial yang terlibat langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi anak jalanan, sedangkan informan kunci berasal dari anak jalanan yang pernah mengikuti program rehabilitasi sehingga dapat memberikan informasi pengalaman langsung sebagai penerima layanan. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja

berdasarkan pertimbangan bahwa mereka dianggap paling mengetahui dan memahami informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono, 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual tentang aktivitas, prosedur, dan kondisi pelaksanaan rehabilitasi di lingkungan Dinas Sosial. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai program, kebijakan, evaluasi, serta hambatan rehabilitasi anak jalanan, baik dari sudut pandang pelaksana maupun penerima manfaat. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara melalui penelaahan dokumen resmi, arsip, data anak jalanan, kebijakan, serta catatan kegiatan rehabilitasi yang relevan, sehingga data yang diperoleh lebih kuat dan dapat diverifikasi (Miles & Huberman, 2014).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data penting yang diperoleh dari lapangan. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan memungkinkan peneliti melihat pola-pola tertentu. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi data yang telah disajikan dan dikaitkan dengan indikator teori peran Edy Suhardono, yaitu aksi, patokan, penilaian, paparan, dan sanksi (Miles & Huberman, 2014; Suhardono, 2018). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik dan sumber, yakni membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta membandingkan informasi dari informan pokok dan informan kunci, sehingga temuan penelitian lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan (Moleong, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam rehabilitasi anak jalanan telah dijalankan melalui berbagai bentuk tindakan nyata yang mencerminkan unjuk peran institusional. Dari aspek aksi (action), Dinas Sosial melaksanakan program rehabilitasi sosial yang meliputi sosialisasi kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada anak jalanan, penjangkauan anak jalanan di titik-titik rawan seperti simpang lampu merah, penempatan sementara di rumah singgah, pembinaan mental dan sosial, serta pemulangan anak ke keluarga atau fasilitasi pendidikan. Program-program tersebut menunjukkan adanya upaya aktif dan terarah dari Dinas Sosial dalam merespons permasalahan anak jalanan secara rehabilitatif dan preventif. Anak-anak yang mengikuti program rehabilitasi menyatakan bahwa mereka mendapatkan layanan dasar seperti tempat tinggal sementara, makanan, pembinaan, dan kegiatan edukatif, meskipun tingkat kenyamanan dan ketertarikan terhadap program bervariasi berdasarkan usia dan kebutuhan masing-masing anak.

Dari aspek patokan (prescription), pelaksanaan rehabilitasi anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penjangkauan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial anak jalanan. Selain itu, Dinas Sosial juga menerapkan prosedur operasional dalam pelayanan rumah singgah dan pembinaan anak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan tersebut telah mencakup aspek penting seperti pendidikan, pelatihan, tempat tinggal, dan pelibatan masyarakat. Namun demikian, dari perspektif anak jalanan, kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan psikologis dan partisipatif mereka, sehingga sebagian anak merasa kurang dilibatkan dalam perencanaan kegiatan dan cenderung merasa bosan atau tertekan oleh aturan yang ada.

Pada indikator penilaian (evaluation), Dinas Sosial Kota Bengkulu melakukan evaluasi terhadap program rehabilitasi melalui berbagai mekanisme, baik formal maupun informal. Evaluasi formal dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat dan pemantauan kinerja program, sedangkan evaluasi informal dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara langsung dengan anak jalanan dan keluarganya, serta diskusi dan konseling selama proses rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan anak jalanan terhadap layanan rehabilitasi berbeda-beda. Anak usia lebih muda cenderung merasa puas karena kebutuhan dasar dan rasa aman terpenuhi, sedangkan anak usia remaja menunjukkan sikap yang lebih kritis dan menilai bahwa program rehabilitasi belum sepenuhnya relevan dengan minat, bakat, dan harapan masa depan mereka, khususnya terkait pelatihan kerja dan kemandirian ekonomi.

Hasil penelitian pada aspek paparan (description) menunjukkan bahwa anak jalanan di Kota Bengkulu umumnya berasal dari latar belakang keluarga yang rentan. Faktor-faktor utama yang mendorong anak hidup di jalanan meliputi kemiskinan, putus sekolah, perceraian orang tua, pengabaian emosional, serta tekanan dalam lingkungan keluarga. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian anak turun ke jalan untuk membantu ekonomi keluarga, sementara yang lain memilih hidup di jalan

sebagai bentuk pelarian dari konflik rumah tangga. Anak-anak yang diwawancarai mengungkapkan bahwa jalanan dianggap sebagai ruang yang memberikan kebebasan, kemandirian, dan kesempatan memperoleh penghasilan, meskipun mereka menyadari adanya risiko yang dihadapi.

Pada indikator sanksi, Dinas Sosial Kota Bengkulu telah menjalankan peran dalam menindak praktik eksploitasi anak jalanan melalui pendekatan preventif, rehabilitatif, dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai larangan eksploitasi anak. Upaya rehabilitatif dilakukan dengan mengamankan anak yang diduga menjadi korban eksploitasi ke rumah singgah untuk dilakukan asesmen dan pendampingan. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menindak pelaku eksploitasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, hasil wawancara dengan anak jalanan menunjukkan persepsi bahwa sanksi terhadap pelaku eksploitasi belum sepenuhnya memberikan efek jera, karena praktik eksploitasi masih ditemukan di lapangan dan penegakan hukum dinilai belum konsisten.

Pembahasan

Pembahasan ini menafsirkan temuan penelitian dengan menggunakan kerangka teori peran Edy Suhardono yang mencakup aksi, patokan, penilaian, paparan, dan sanksi. Kerangka ini membantu menjelaskan bagaimana Dinas Sosial Kota Bengkulu menjalankan perannya sebagai institusi publik dalam rehabilitasi anak jalanan, sekaligus mengidentifikasi bagian yang sudah berjalan dan yang masih memerlukan penguatan (Suhardono, 2018). Pada indikator aksi (action), temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bengkulu telah menampilkan “unjuk peran” melalui tindakan nyata seperti sosialisasi, penjangkauan, rumah singgah, pembinaan, pemulangan anak ke keluarga, fasilitasi pendidikan, serta kerja sama dengan Satpol PP dan pihak terkait. Dalam teori peran, aksi merupakan bentuk perilaku kasat mata yang menunjukkan perwujudan peran (role performance) dan keterarahan institusi pada tujuan tertentu (Suhardono, 2018). Hal ini berarti, secara operasional Dinas Sosial telah bergerak pada ranah praktik, bukan hanya pada tataran kebijakan. Namun, variasi pengalaman anak dalam mengikuti program (ada yang merasa terbantu, ada yang merasa bosan atau kurang cocok) menandakan bahwa kualitas aksi tidak cukup dinilai dari “ada atau tidaknya program”, tetapi juga dari kesesuaian layanan terhadap kebutuhan anak berdasarkan usia, kondisi psikososial, serta minat dan aspirasi masa depan mereka. Dalam perspektif pelayanan sosial, program yang efektif seharusnya tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperkuat keberfungsian sosial dan kemandirian anak secara bertahap.

Pada indikator patokan (prescription), temuan menunjukkan bahwa Dinas Sosial menjalankan rehabilitasi dengan mengacu pada regulasi daerah sebagai standar perilaku institusional, khususnya Peraturan Daerah yang mengatur penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Dalam kerangka teori peran, patokan merupakan norma/kaidah dan standar yang memuat “keharusan” (oughtness/shouldness) dan menjadi pijakan legitimasi tindakan (Suhardono, 2018). Artinya, peran Dinas Sosial memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tindakan penjangkauan dan pembinaan dapat dipahami sebagai mandat formal institusi. Meski demikian, hasil wawancara dengan anak jalanan menunjukkan adanya kesenjangan antara patokan normatif dan pengalaman penerima manfaat di lapangan. Sebagian anak merasakan program “kurang sesuai”, “kurang melibatkan anak”, atau “terlalu ketat”. Hal ini mengindikasikan bahwa patokan yang kuat perlu diikuti oleh implementasi yang lebih responsif (child-centered), karena keberhasilan rehabilitasi bukan hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh pendekatan yang sesuai kebutuhan subjek layanan. Pada indikator penilaian (evaluation), Dinas Sosial melakukan evaluasi melalui survei kepuasan, observasi lapangan, wawancara, diskusi, dan konseling. Dalam teori peran, penilaian berkaitan dengan approval–disapproval dan mekanisme evaluatif yang dapat muncul dalam bentuk taksiran kinerja maupun umpan balik dari penerima manfaat (Suhardono, 2018). Secara kelembagaan, keberadaan evaluasi formal dan informal menunjukkan adanya kesadaran institusi untuk mengukur mutu layanan. Namun, temuan juga memperlihatkan bahwa kepuasan anak jalanan bersifat beragam: anak usia lebih kecil cenderung puas pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar dan rasa aman, sedangkan remaja lebih menuntut relevansi program dengan kebutuhan kemandirian, pelatihan kerja nyata, dan rencana masa depan. Ini sejalan dengan pandangan bahwa kebutuhan layanan sosial bersifat berbeda berdasarkan tahap perkembangan, sehingga penilaian program idealnya tidak disamaratakan, melainkan dibedakan berdasarkan kelompok usia dan karakteristik penerima manfaat. Dalam pendekatan evaluasi kebijakan dan program sosial, indikator keberhasilan juga perlu melampaui “kepuasan” dan mencakup outcome seperti keberlanjutan sekolah, reintegrasi keluarga, serta penurunan frekuensi anak kembali ke jalan.

Pada indikator paparan (description), hasil penelitian memperlihatkan karakteristik anak jalanan yang dominan berasal dari latar belakang keluarga bermasalah (broken home, konflik rumah tangga), kemiskinan, pengabaian emosional, dan putus sekolah. Dalam teori peran, paparan merupakan

penyajian deskriptif mengenai fenomena tanpa muatan evaluatif, sehingga berfungsi sebagai dasar pemahaman objektif untuk perumusan tindakan (Suhardono, 2018). Data paparan ini penting karena menunjukkan bahwa “masuknya anak ke jalan” tidak semata pilihan individual, melainkan hasil akumulasi faktor struktural dan psikososial. Temuan wawancara juga memperlihatkan bahwa jalanan bagi sebagian anak menjadi ruang pelarian sekaligus ruang mencari otonomi dan penghasilan. Implikasinya, rehabilitasi tidak cukup hanya berupa penertiban atau penampungan sementara, tetapi harus disertai intervensi keluarga, penguatan akses pendidikan, dan dukungan psikologis yang konsisten agar anak tidak kembali ke jalan. Pada indikator sanksi, Dinas Sosial menjalankan langkah preventif (sosialisasi/edukasi), rehabilitatif (mengamankan anak ke rumah singgah, asesmen), dan represif (koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap pelaku eksploitasi). Dalam teori peran, sanksi adalah tindakan yang secara eksplisit atau implisit bertujuan mengubah perilaku pihak lain agar lebih konform terhadap patokan/norma (Suhardono, 2018). Secara konsep, langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya pengendalian sosial untuk mencegah eksploitasi. Namun, persepsi anak jalanan menyatakan bahwa sanksi kepada pelaku eksploitasi belum cukup tegas dan belum menimbulkan efek jera. Ini mengindikasikan adanya masalah pada konsistensi penegakan atau jangkauan kontrol sosial di lapangan. Dalam konteks kebijakan publik, sanksi yang tidak konsisten akan melemahkan daya paksa norma, sehingga perilaku menyimpang (eksploitasi anak) tetap berulang dan program rehabilitasi menjadi tidak stabil.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini menunjukkan pola yang relatif sejalan bahwa peran Dinas Sosial dalam penanganan kelompok rentan sering menghadapi tantangan implementasi dan efektivitas program di lapangan. Misalnya, penelitian mengenai pembinaan gelandangan dan pengemis menyoroti bahwa peran dinas sosial belum sepenuhnya optimal karena aspek koordinasi, monitoring, dan evaluasi masih perlu diperkuat (Ameliyah, 2024). Demikian pula, penelitian lain mengenai rehabilitasi anak jalanan di daerah berbeda menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi dapat belum maksimal jika dukungan sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan sistem layanan belum kuat (Alfayi, 2024). Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi anak jalanan tidak hanya bergantung pada keberadaan program, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, kolaborasi lintas lembaga, serta ketegasan penegakan norma terhadap eksploitasi. Secara keseluruhan, peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam rehabilitasi anak jalanan dapat dinilai telah berjalan dan cukup lengkap dari sisi indikator teori peran, terutama pada aspek aksi dan patokan. Namun, penguatan masih diperlukan pada aspek penilaian berbasis kebutuhan anak (terutama remaja), perbaikan pendekatan yang lebih partisipatif dan berpusat pada anak, serta peningkatan konsistensi sanksi terhadap pelaku eksploitasi agar menghasilkan efek jera dan mencegah anak kembali ke jalan. Penguatan ini penting agar rehabilitasi tidak berhenti pada layanan sementara, melainkan benar-benar memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosial anak secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori peran Edy Suhardono yang meliputi aksi, patokan, penilaian, paparan, dan sanksi, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam rehabilitasi anak jalanan di Kota Bengkulu telah terlaksana dan berjalan cukup baik, meskipun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek. Pada indikator aksi, Dinas Sosial telah melaksanakan tindakan nyata melalui sosialisasi, penjangkauan, layanan rumah singgah, pembinaan, pemulangan anak ke keluarga, fasilitasi pendidikan, serta koordinasi dengan pihak terkait. Pada indikator patokan, pelaksanaan rehabilitasi telah mengacu pada regulasi daerah yang menjadi dasar hukum penanganan anak jalanan, sehingga tindakan institusi memiliki legitimasi formal. Pada indikator penilaian, Dinas Sosial melakukan evaluasi program melalui survei kepuasan, observasi lapangan, wawancara, serta mekanisme informal seperti diskusi dan konseling, namun tingkat kepuasan anak menunjukkan variasi—anak usia kecil cenderung puas pada pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan remaja menilai program belum sepenuhnya sesuai kebutuhan kemandirian dan masa depan. Pada indikator paparan, karakteristik anak jalanan di Kota Bengkulu didominasi oleh latar belakang keluarga bermasalah, kemiskinan, putus sekolah, dan pengabaian emosional, yang mendorong anak memilih hidup atau beraktivitas di jalan. Pada indikator sanksi, Dinas Sosial telah melakukan langkah preventif, rehabilitatif, dan represif terhadap eksploitasi anak, namun persepsi anak jalanan menunjukkan bahwa penegakan sanksi masih dianggap belum cukup tegas dan belum menimbulkan efek jera yang kuat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, Dinas Sosial Kota Bengkulu perlu meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi melalui penguatan fasilitas rumah singgah, penambahan pendamping profesional (pekerja sosial, konselor/psikolog), serta penyediaan kegiatan yang lebih variatif agar anak tidak cepat bosan dan merasa lebih nyaman mengikuti program. Kedua, program rehabilitasi perlu dikembangkan dengan pendekatan child-centered dan lebih partisipatif, yaitu melibatkan anak dalam penyusunan kegiatan sesuai usia, kebutuhan psikologis, dan minat mereka, khususnya bagi anak usia remaja yang membutuhkan orientasi keterampilan kerja, magang, atau pelatihan yang lebih aplikatif. Ketiga, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat secara lebih konsisten, baik dengan Satpol PP, kepolisian, lembaga perlindungan anak, sekolah, layanan kesehatan, maupun organisasi sosial, sehingga penanganan anak jalanan dapat lebih terintegrasi dari sisi pencegahan hingga reintegrasi sosial. Keempat, penegakan sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak perlu ditingkatkan melalui pengawasan lapangan yang lebih intensif dan tindak lanjut hukum yang jelas agar menimbulkan efek jera serta memutus rantai eksploitasi. Kelima, perlu dilakukan penguatan intervensi keluarga dan ekonomi, misalnya melalui pendampingan keluarga rentan dan rujukan program bantuan sosial, karena faktor keluarga dan kemiskinan merupakan penyebab dominan anak kembali ke jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfayi, R. P. (2024). Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016. Skripsi, Universitas Nama Universitas. PDF Tersedia di: [link](#) .
- Ameliyah, U. (2024). Analisis Peran Dinas Sosial Kota Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Bengkulu. *Jurnal Edunomika*, Vol. 08, No. 04, 2024. PDF Tersedia di: [link](#) .
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu*. BPS Kota Bengkulu.
- Baltes, P. B. (1997). On the Inverse Relationship Between Aging and the Number of Roles. *Psychology and Aging*, 12(1), 45-55.
- Dinas Sosial Kota Bengkulu. (2024). *Laporan Data Anak Jalanan dan Pengemis Tahun 2024*. Dinas Sosial Kota Bengkulu.
- Edy Suhardono. (2018). *Teori Peran*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Greenfield, E. A., & Marks, N. F. (2004). Formal Volunteering as a Protective Factor for Older Adults' Psychological Well-Being. *The Journals of Gerontology: Series B*, 59(5), S258-S264.
- Hogg, M. A. (2000). Social Identity Theory: Past Achievements, Current Problems and Future Challenges. *European Journal of Social Psychology*, 30(3), 239-252.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan*. Kementerian Sosial RI.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Riduwan. (2010). *Metode dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*. Alfabeta.
- Riley, M., & Riley, J. W. (1994). Age and the Transition to Adulthood. *Journal of Marriage and Family*, 56(1), 47-62.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suhardono, E. (2018). Teori Peran. PT Pustaka Utama. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Winarno, B. (2018). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. CAPS.